

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pada kehidupan demokrasi, media memainkan peran penting sebagai kekuatan utama dalam proses politik, khususnya dalam pembentukan kebijakan. Para pembuat kebijakan menganggap media tidak hanya sebagai refleksi opini publik, tetapi juga sebagai sarana untuk memantau lingkungan politik di mana mereka bekerja (Koch-Baumgarten & Voltmer, 2010). Penelitian Walgrave dan Van Aelst (2006) yang mengkaji 19 studi dari tiga dekade terakhir menunjukkan bahwa media memiliki pengaruh signifikan terhadap pembuatan kebijakan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa media merupakan kekuatan penting dalam proses kebijakan dan perlu diperhatikan secara sistematis untuk memahami dinamika kebijakan publik dengan lebih baik.

Selain itu, media memiliki fungsi sebagai perantara yang memfasilitasi berbagai pihak yang memiliki kepentingan, dengan menyajikan argumen yang mendukung atau menentang perkembangan wacana kebijakan. Dalam proses penyebaran informasi media melibatkan kelompok kepentingan, dengan tujuan membentuk suatu wacana agar dapat menjadi kebijakan publik yang diinginkan (Reckhow & Tompkins-Stange, 2018). Menurut Hajer (2005a), wacana diartikan sebagai kumpulan gagasan, konsep, dan kategori yang memberi makna pada fenomena sosial dan fiksi, yang direproduksi melalui berbagai praktik yang dapat diidentifikasi. Hal ini juga terjadi apabila kebijakan dipandang sebagai sebuah persaingan untuk mendapatkan dukungan masyarakat, strukturisasi wacana terjadi saat suatu wacana spesifik diterima

oleh masyarakat lebih daripada wacana lainnya. Indikasinya adalah wacana tertentu menjadi topik pembicaraan yang dominan dalam masyarakat, baik melalui liputan media, diskusi di seminar, percakapan di media sosial, dan sebagainya (Hajer, 2006). Maka dari itu, pihak-pihak yang memiliki kepentingan dapat mengevaluasi kesamaan dan perbedaan dalam susunan dan struktur jaringan wacana kebijakan. Selain itu, hal ini membantu menentukan apakah para pendukung suatu wacana kebijakan dapat memanfaatkan pemahaman jaringan untuk menghadapi oposisi terhadap wacana kebijakan tersebut (Leifeld, 2016).

Wacana yang tersebar di berbagai media memiliki potensi untuk membentuk serangkaian jaringan yang saling terkait. Teks-teks dalam media juga memiliki kemampuan untuk menggambarkan jaringan yang terbentuk dalam suatu fenomena tertentu (Fisher et al., 2013). Pada konteks ini, jaringan yang terbentuk disebut sebagai jaringan wacana. Penggunaan istilah "jaringan wacana" umumnya merujuk pada pemahaman hubungan antara suatu wacana dengan kebijakan publik (Eriyanto & Ali, 2020). Jaringan wacana ini memiliki peran penting dalam menggambarkan pola munculnya wacana, identifikasi pelaku yang mengusulkan wacana, dan memetakan koneksi atau hubungan antara wacana tersebut.

Di Indonesia, beragam kebijakan publik yang kontroversial dan menimbulkan pro-kontra di masyarakat melalui media dapat membentuk sebuah jaringan wacana beserta aktor pembuat wacana yang kompleks. Silalahi (2023) menunjukkan kebijakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) mengalami pergolakan jaringan wacana yang kompleks dengan dominasi aktor pembuat wacana yang pro atas pengesahan aturan kontroversial tersebut. Contoh lain, Sofura (2023) menemukan bahwa

kebijakan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sangat dipengaruhi oleh jaringan wacana yang terbentuk dari relasi antar-aktor pembuat wacana yang tersebar di media. Berikutnya, konteks kebijakan lain, Pustika Chandra Kasih (2023) mendeskripsikan terkait perdebatan mengenai wacana pembangunan proyek kereta cepat Jakarta- Bandung (KCJB), termasuk koalisi wacana yang tercipta di antara pemangku kepentingan.

Membahas kebijakan yang kontroversial dan menimbulkan pro-kontra di masyarakat tentu tidak berhenti pada isu di atas. Salah satu kebijakan yang juga berpotensi membentuk struktur jaringan wacana dan aktor pembuat wacana adalah terkait kebijakan kendaraan listrik di Indonesia. Bermula dari upaya mengurangi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan oleh polusi udara, pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini telah diatur sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi target Perjanjian Paris, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca. Badan Energi Internasional memperkirakan bahwa kendaraan listrik sangat penting untuk transportasi berkelanjutan karena tidak menghasilkan emisi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil (Maghfiroh et al., 2021).

Untuk dapat meningkatkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, salah satunya pemberian insentif fiskal dan non-fiskal yang merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030. Namun, kebijakan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia tentunya menimbulkan beragam pro dan kontra di masyarakat. Pro dan kontra

tersebut mencakup berbagai aspek, seperti pemberian insentif kepada pembeli kendaraan listrik, isu lingkungan, dan fasilitas pengisian daya (SPKLU) (Olivia & Sari, 2023). Wacana mereka yang pro biasanya didukung oleh masyarakat yang menilai bahwa kendaraan listrik dapat menghadirkan peluang untuk mengurangi risiko lingkungan dan keamanan ketergantungan pada minyak (Lane et al., 2013). Selain itu, biaya pajak dari kendaraan listrik mendapatkan insentif dari pemerintah, biaya pengisian daya relatif lebih murah dari Bahan Bakar Minyak (BBM), dan kendaraan listrik dapat mengurangi emisi karbon di udara (Olivia & Sari, 2023).

Di sisi lain, kebijakan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia juga menuai kontra. Kendaraan listrik dianggap kurang efektif sebagai upaya perbaikan kualitas udara, karena pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang menyediakan energi untuk kendaraan listrik dapat menghasilkan dan menyumbang polusi udara. (Olivia & Sari, 2023). Tidak hanya itu, infrastruktur untuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) masih terbatas dan belum merata di berbagai wilayah (Muttaqin, 2023).

Dengan munculnya pro dan kontra di masyarakat mengenai kebijakan penggunaan kendaraan listrik ini tidak dapat dipisahkan dari media massa, yang secara aktif dan masif memberitakan kebijakan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia kepada publik. Media cetak, elektronik, dan digital ikut serta berkontribusi dalam mengedukasi dan mempromosikan kendaraan listrik di tengah masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena media massa memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik mengenai kebijakan penggunaan kendaraan listrik (Zewitra et al., 2023). Oleh sebab itu, dengan adanya pro dan

kontra yang tersebar di masyarakat mengenai kebijakan kendaraan listrik maka ada sebuah wacana yang dipertarungkan.

Setiap kebijakan yang dibuat tidak menutup kemungkinan akan memunculkan beragam wacana perdebatan dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Wacana yang muncul pada media massa biasanya membahas mengenai kebijakan pemerintah (Park, 2009). Hal ini juga terjadi pada kebijakan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Beragam wacana muncul di dalam kebijakan tersebut, mulai dari wacana pemberian subsidi pada pembelian kendaraan listrik, wacana mobil listrik ramah lingkungan jadi kebijakan yang "mahal", hingga wacana bahwa kendaraan listrik masih mengandalkan batu bara. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengidentifikasi jaringan wacana dan aktor-aktor yang muncul di media terkait kebijakan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia dengan menggunakan metode analisis jejaring wacana. Metode analisis jejaring wacana, yang dikenal sebagai *Discourse Network Analysis* (DNA), yang digunakan untuk menggambar peta wacana dan pelaku, serta untuk mengidentifikasi persetujuan dan konflik dalam wacana yang pelaku sampaikan (Leifeld, 2013; Ghinoi & Omori, 2023).

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan sampel dari dua media *online* terkemuka di Indonesia, yakni Kompas.com dan Kumparan.com, yang berfokus pada jangka waktu 2019-2023. Alasan pemilihan ini adalah karena kedua media tersebut ikut serta secara aktif memberitakan mengenai kebijakan kendaraan listrik di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana jaringan antara aktor dan wacana serta jaringan antara organisasi dan wacana terbentuk dalam kebijakan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia?

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

1. Apa saja wacana utama dalam kebijakan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia?
2. Bagaimana jaringan di antara aktor dan wacana dalam kebijakan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia?
3. Bagaimana jaringan di antara organisasi dan wacana dalam kebijakan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk memetakan wacana utama dalam kebijakan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia
2. Untuk memetakan jaringan di antara aktor dan wacana dalam kebijakan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia
3. Untuk memetakan jaringan di antara organisasi dan wacana dalam kebijakan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Akademis**

Penelitian ini memiliki nilai akademis yang signifikan karena menerapkan metodologi analisis jejaring wacana dengan menggunakan teori "Discourse Coalition Framework" dalam meneliti kebijakan kendaraan listrik

di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap bagaimana kelompok-kelompok diskursif atau "*discourse coalition*" terbentuk, berinteraksi, dan memengaruhi pembentukan kebijakan kendaraan listrik. Hasil penelitian diharapkan dapat membuka jalan bagi pengembangan lebih lanjut dalam pemahaman dinamika politik di sektor transportasi berkelanjutan di Indonesia.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini secara praktis dapat memberikan pandangan terhadap dinamika wacana di sekitar kebijakan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia dan membantu pemangku kepentingan untuk memahami posisi dan pandangan aktor yang terlibat. Kemudian, hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi penyusunan strategi komunikasi yang efektif, baik bagi pemerintah maupun pihak terkait lainnya, dengan memahami bagaimana sebuah wacana yang terbentuk dapat memengaruhi persepsi publik dan dukungan terhadap kebijakan listrik.

### **1.5.3 Kegunaan Sosial**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu seputar kebijakan kendaraan listrik, memberikan informasi yang lebih komprehensif, dan merangsang partisipasi dalam dialog publik.

Penelitian ini memberikan dasar bagi masyarakat untuk memahami dinamika kebijakan dan faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan opini publik. Hal ini dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan mendorong tanggapan yang lebih beragam terhadap kebijakan kendaraan listrik.

#### **1.5.4 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah unit analisis yang digunakan. Unit analisis hanya berasal dari dua media, yaitu Kompas.com dan Kumparan.com. Hal ini disebabkan oleh kendala pada saat *scrapping* (pengumpulan data) menggunakan aplikasi Octoparse, dimana hanya dua media tersebut yang datanya berhasil di-*scrap*.

